

PERLAWANAN MASYARAKAT KOREA SELATAN MENUJU GERBANG DEMOKRASI TAHUN 1980

Oleh:
Retno Ayu Oktaviani dan Agus Mulyana¹

ABSTRACT

The research was an in-depth study concerning the events of Gwangju society's resistance against the authoritarian Government that occurred in 1980. Problem formulation is "how has Gwangju Democratization Movement in 1980 occurred?". Researchers conducted historical methods, including collecting writing sources through literature study, critic source, interpretation or source analysis and historiography. The results found that democracy in South Korea was hampered Confucianism ideology which then led South Korea became authoritarian Government. The movement of students and Gwangju's society were a peaceful act, but military responded back with a violation and the Government manipulate media to cover up an event so it cannot be used as an opportunity for North Korea. Gwangju democratization movement became 'the gate' in other regions of South Korea to realize democracy.

Keywords: Democracy, Social Movement, Yushin Constitution, Regionalism, Confucianism

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu sekumpulan kelompok maupun individu yang mendiami suatu wilayah dan memiliki organisasi yang digerakan oleh pemerintahan yang sah, dan memiliki kedaulatan. Negara bisa disebut juga sebagai suatu wilayah yang memiliki aturan-aturan yang mengikat dan berlaku bagi seluruh individu yang di wilayah tersebut. Berdirinya suatu negara memerlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi dari negara tersebut agar mampu berjalan sesuai dengan keinginan individu dalam negara tersebut. Secara umum Plato dan Aristoteles dalam teori pemerintahannya membagi bentuk

pemerintahan kedalam tribagian (tripartite clasification). Menurut Plato bahwa tiga bentuk pemerintahan terbaik secara berturut-turut ialah kerajaan, aristokrasi dan demokrasi. Bentuk pemerintahan akan merosot akan memunculkan tirani, bentuk pemerintahan aristokrat akan merosot akan memunculkan oligharki, dan jika pemerintahan demokrasi merosot akan memunculkan mobokrasi (Andriyan, 2016, hlm. 58).

Demokrasi oleh beberapa negara mempercayai bahwa dengan mengaplikasikan bentuk pemerintahan demokrasi, negara tersebut akan maju menjadi negara yang sejahtera dan makmur walaupun ada beberapa negara

¹Retno Ayu Oktaviani adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Agus Mulyana adalah dosen pembimbing I. Penulis dapat dihubungi di nomor 083822303916.

yang tidak meyakini bentuk pemerintahan demokrasi akan menjadi kunci menuju kesejahteraan, setidaknya Amerika Serikat menjadi bukti bahwa Amerika Serikat sebagai negara demokrasi cukup berhasil menjadi negara superpower walaupun ada beberapa faktor lainnya yang menyokong Amerika Serikat untuk menjadi negara besar.

Sebuah negara demokrasi pada umumnya dicirikan oleh: freedom of press and speech, freedom of assembly, popular sovereignty, political freedom, civil right, religious freedom, freedom of movement, economic opportunity, equal education opportunity (Cunningham, 2002, hlm. 2). Demokratisasi sendiri merupakan bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri dengan adanya gerakan-gerakan civil society, seperti LSM dan Ormas menjadi salah satu aspek pendukung demokratisasi, yang juga berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas jalannya pemerintahan hasil bentukan pemilu yang demokratis.

Perjalanan demokratisasi di Korea Selatan tidak lepas dari peran buruh yang membuka gerakan menuju keadilan dalam perekonomian dan politik. Sampai tahun 1960-an, sekitar 65% penduduk di Korea Selatan merupakan pekerja di bidang pertanian dan perikanan. Karena pada saat itu mereka belum mampu untuk memiliki modalnya sendiri, mereka pada akhirnya harus mendekati kekuatan politik untuk memperoleh bantuan modal dan barang-barang impor lainnya sehingga secara tidak langsung dalam hal ekonomi, mereka masih bergantung kepada negara dan negara menguasai masyarakat sipil secara total, dalam hubungan penguasa seperti ini masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan di bidang politik. Pada tahun

1970-an, masyarakat sipil di Korea Selatan mulai berusaha untuk memperjuangkan secara langsung kedudukannya terhadap negara dengan alasan sangat besarnya kekuasaan negara dan masalah ketidakadilan penguasaan kekayaan nasional. Masyarakat sipil juga berusaha untuk menunjukkan sifat ketidakadilan dalam menentang rezim diktator pada saat itu (Yoon, 2003, hlm. 51).

Terdapat sejumlah faktor dibalik keberhasilan demokratisasi di Korea Selatan menurut Yang Seung Yoon (2003, hlm. 52-53) diantaranya adalah, pertama, unsur-unsur sosio-ekonomi. Sejak tahun 1980-an kelas menengah Korea semakin bertambah besar dan struktur sosial yang ada di Korea semakin bervariasi. Dalam usaha pembentukan kembali sosial masyarakat Korea, kelas menengah mulai menempati posisi yang dapat diperhitungkan, sementara itu kelas perburuhan juga semakin bertambah besar dan berkembang menjadi kekuatan anti-sistem yang ada.

Kedua, unsur-unsur psikologis. Industrialisasi, urbanisasi, meluasnya media massa, penambahan tinggi taraf pendidikan, internasionalisasi dan sebagainya telah mengakibatkan kesadaran politik rakyat Korea Selatan semakin mengarah pada kestabilan. Semua rakyat negara harus secara bersama mencapai tingkat kenegaraan yang maju. Dengan telah tercapainya tingkat kemajuan tersebut secara otomatis demokratisasi harus dikembangkan.

Ketiga, unsur-unsur politik. Sejak tahun 1980-an, kemunculan tokoh-tokoh politik baru Korea yang tidak lagi bersifat ortodoks mulai menggeser sifat otoriter politikus lama. Sementara itu, di luar sistem

politik Korea terdapat suatu kekuatan yang disebut *Jaeya* yang berarti 'berada di lapangan terbuka', suatu kekuatan yang pernah menjadi korban kesewenangan pemerintah dan memperluas ruang lingkup aksinya. *Jaeya* kemudian berkembang secara pesat sebagai kekuatan politik.

Keempat, unsurlingkungan masyarakat internasional. Sejak tahun 1980-an, di negara-negara dunia ketiga sering terjadi perubahan politik yang disebabkan karena mulai melemahnya pengaruh Uni Soviet dan ikut terguncangnya negara-negara Blok Komunis Eropa Timur. Disamping itu, negara-negara benua Afrika dan Asia yang sampai saat itu menjadi bagian dari kekuatan politik Internasional lama, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga mulai terkena dampaknya. Kecenderungan perubahan yang terjadi di masyarakat internasional itu dengan segera dan secara tegas memberikan pengaruh bagi proses demokratisasi di Korea Selatan.

Pada tahun 1970, terjadi suatu pergerakan buruh untuk menuntut Undang-Undang perburuhan di Korea Selatan. Pada periode ini merupakan masa dimana komunisme merupakan hal yang menakutkan bagi rakyat Korea Selatan, sehingga masyarakat selama ini memilih untuk bungkam dan diam, kritik dan bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat akan segera dilindas dan dibungkam oleh pihak pemerintah. Pada bulan November 1970, terjadi aksi bunuh diri seorang buruh bernama Chun Tae-Il dengan cara membakar dirinya sendiri sebagai bagian dari protes terhadap situasi perburuhan saat itu.

Kejadian tersebut membuat para pekerja perempuan lebih sadar akan hak-

hak mereka dan membawa partisipasi aktif mahasiswa dalam gerakan buruh. Serikat buruh, *Uni Garmen Chonggye*, dibentuk setelah bunuh diri pekerja tersebut. Pemerintah secara resmi mengakui serikat pekerja di bulan yang sama. Aksi protes buruh tersebut sebagai reaksi terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perampasan hak-hak pekerja dasar. Meskipun insiden ini dipicu oleh satu kematian kejam pekerja laki-laki, hal itu menerangi kehidupan keras para pekerja perempuan terutama di pusat garmen, yang tersembunyi di balik gambaran kemakmuran pertumbuhan nasional. Aksi bunuh diri Chun Tae-Il kemudian menjadi titik tolak kebangkitan gerakan serikat buruh di Korea Selatan, sejak saat itu mulai banyak pergerakan buruh yang dilakukan rakyat Korea Selatan untuk menuntut keadilan perburuhan, menuntut agar buruh diperlakukan secara manusiawi diantaranya adalah pergerakan buruh *Dong-Il*, pergerakan buruh *YH Trades*, dan gerakan buruh *Busan-Masan* atau lebih dikenal dengan gerakan *Bu-Ma*.

Pergerakan *Dong-Il* dimulai dengan aksi mogok makan dan mogok kerja buruh pekerja *Dong-Il Textile*, lebih dari 400 orang buruh perempuan *Dongil Textile* menentang perusahaan mereka yang berafiliasi dengan serikat dagang dan melawan pergerakan polisi dengan aksi membuka pakaian mereka sehingga harus digiring ke stasiun polisi. Pada tahun 1979, lebih dari 200 orang buruh perempuan dari perusahaan perdagangan *YH* melawan penutupan pabrik dan melakukan unjuk rasa duduk untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Seorang buruh perempuan tewas terbunuh oleh kekerasan polisi dan lebih dari 100 buruh mengalami luka-luka (Matsui, 2002, hlm. 219). Aksi buruh yang didominasi oleh buruh wanita ini

disebabkan oleh kebijakan Park yang pada saat itu menerapkan kebijakan yang mempekerjakan buruh wanita secara keras dan upah mereka yang kecil tidak sebanding dengan tenaga yang telah mereka keluarkan.

Gerakan Busan-Masan merupakan gerakan lanjutan dari gerakan buruh perusahaan perdagangan YH dan juga gerakan untuk menentang kebijakan Park yaitu kebijakan Yushin yang dianggap sebagai puncak dari munculnya pemerintahan yang diktator di Korea Selatan. Pemogokan buruh tersebut sering disebut sebagai perlawanan anti-diktator dan gerakan pro-demokrasi. Perselisihan di Dong-Il dan perdagangan Y.H. memuncak selama periode krisis politik di Korea Selatan. Gerakan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa adanya sifat pemerintah yang menolak sebuah gerakan pro-demokrasi. Gerakan represif buruh adalah target yang sangat penting untuk mengejar keadilan mereka (Mikyong, 2003, hlm. 89-90).

Gerakan Busan-Masan yang terjadi selama lima hari yaitu pada tanggal 16 Oktober 1979-20 Oktober 1979 memberikan dampak kepada masyarakat Gwangju untuk meneruskan aksi tersebut yaitu menentang adanya Konstitusi Yushin dan mengembalikan pemerintahan Korea Selatan menjadi negara Demokrasi yang sebenarnya. Pemberontakan Warga Negara Korea tersebut secara resmi diberi nama Gerakan Demokratik Gwangju. Warga mengorbankan diri mereka sendiri dalam upaya untuk mengakhiri rezim Yushin dan menghalangi pengambilalihan kelompok militer baru tersebut, dengan harapan dapat mewujudkan demokrasi yang demokratis. Gerakan demokrasi

Gwangju menjadi titik balik gerakan demokratisasi Korea, yang diwujudkan dalam konfrontasi antara orang-orang yang mencoba mempublikasikan gerakan tersebut untuk memulihkan demokrasi, dan pihak berwenang yang berusaha menekan usaha tersebut (Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths Republic of Korea, 2004, hlm. 211).

Berdasarkan catatan sejarah dan latar belakang dari pergerakan tersebut menarik minat penulis mengambil kajian ini, dari berbagai gerakan buruh dan gerakan masyarakat melawan pemerintah, Gerakan Gwangju-lah yang dinilai berhasil dalam membuka perubahan dalam pemerintahan di Korea Selatan, selain itu Gerakan Gwangju merupakan gerakan yang mendapat tindakan yang keras baik dari pemerintah maupun militer hingga wilayah Gwangju ditutup dan dijaga oleh tentara militer. Oleh karena itu peneliti berusaha menelusuri sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan Gerakan Demokratisasi Gwangju. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan pentingnya peranan buruh dan masyarakat dalam kehidupan pemerintahan di Korea Selatan. Adapun masalah yang ingin dipecahkan penulis adalah “Bagaimana peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju pada tahun 1980 terjadi?”. Melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju pada tahun 1980.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode penelitian historis merupakan salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara

sistematik berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang (Ismaun, 2005, hlm. 34). Menurut Gottschalk (2008, hlm. 39) metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis bukti-bukti baik berupa rekaman ataupun peninggalan lainnya dan kemudian direkonstruksi secara imajinatif. Wood Gray (Sjamsuddin, 2007, hlm. 70) memaparkan paling tidak ada enam tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah yaitu: memilih topik yang sesuai, mengusut bukti yang sesuai dengan topik, membuat catatan apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung, mengevaluasi secara kritis semua bukti yang telah dikumpulkan (kritik sumber), menyusun hasil-hasil penelitian, menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin. Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode historis merupakan salah satu prosedur untuk memecahkan permasalahan sejarah dengan melakukan analisis terhadap bukti-bukti sejarah atau peninggalan masa lampau yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu lalu dikomunikasikan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 14 Mei 1980 sekitar 6.000 mahasiswa Universitas Nasional Cheonnam, sebuah universitas Korea

Selatan yang terletak di kota metropolitan Gwangju yang berada di tengah provinsi Jeolla Selatan mengadakan gerakan kampus yang kemudian turun kejalan untuk bertemu dengan pemerintah setempat dan membicarakan sebuah upaya demokrasi di Gedung Pemerintahan Provinsi Jeolla. Tidak hanya di Gwangju, pada tanggal 14 Mei 1980 juga terjadi gerakan yang serupa di Seoul, gerakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja melainkan sebanyak 70.000 orang bergabung dalam demonstrasi tersebut, mereka mencurahkan mengenai sentimen terhadap kediktatoran yang telah berlangsung lama (Katsificas, 2012, hlm. 165). Gerakan tersebut masih berlangsung di keesokan harinya dengan membawa pasukan yang lebih banyak dari hari sebelumnya yaitu sekitar 15.000 mahasiswa. Pada tanggal 16 Mei 1980, sebanyak 30.000 mahasiswa dari sembilan Universitas yang berbeda yaitu Universitas Nasional Chonnam, Universitas Chosun, Universitas Pendidikan Gwangju dan Universitas lainnya yang berada di wilayah Gwangju melakukan rapat besar di Universitas Nasional Cheonnam karena pemerintah menyatakan bahwa Majelis Nasional akan mengadakan pertemuan pada tanggal 17 Mei 1980, untuk menyelesaikan perselisihan politik yang disebabkan oleh protes mahasiswa dan gerakan lainnya. Diklaim bahwa Majelis akan membahas pencabutan darurat militer dan mengusulkan kerangka waktu baru untuk reformasi politik. Ini sepertinya menjadi solusi untuk situasi politik yang rumit. Anggota Gerakan Pro-demokrasi melihat pengumuman tersebut sebagai langkah maju perubahan pemerintahan Korea Selatan, dan aktivis mahasiswa mengantisipasi sebuah perubahan nyata.

Pukul 5:30 sore pada tanggal 16 Mei 1980, lima puluh sembilan pemimpin mahasiswa mengadakan pertemuan pertama Korps Serikat Mahasiswa Nasional di Universitas Wanita Ewha, di Seoul. Pertemuan berlanjut sepanjang malam, hingga keesokan harinya.

Pada malam harinya, kendaraan militer yang membawa pasukan payung terlihat menuju Gwangju di jalan tol Seoul-Gwangju terlihat. Pada sore hari berikutnya, hampir seribu pasukan payung menunggu instruksi dari Gabungan Senjata Perintah/Combined Arms Command (CAC) di Gwangju. Pada sore hari tanggal 17 Mei 1980, mahasiswi dari Chonnam University melaporkan bahwa semua pemimpin di Seoul salah satunya adalah Kim Yong Sam dan Kim Dae Jung, telah ditangkap berdasarkan undang-undang darurat militer. Setelah mengetahui bahwa penangkapan besar-besaran oleh pihak militer sudah dekat, pimpinan dari mahasiswa Chonnam melarikan diri ke Kabin Mudung di pinggiran kota. Pukul 09:00, mereka pergi ke Hotel Taeji dan berusaha memeriksa situasi di Seoul, namun gagal melakukan komunikasi. Anggota dari kumpulan mahasiswa tersebut memutuskan untuk bersembunyi. Kurang dari satu jam kemudian, sesaat setelah para pemimpin mahasiswa pergi, polisi menggerebek Hotel Taeji. Pukul 11:00, aktivis pemuda dan pemimpin yang dianggap radikal di seluruh kota ditahan. Dengan gerakan militer yang luas, agen intelijen militer dan polisi menggerebek kamar tidur mereka dan membawa mereka keluar dengan todongan senjata. Petugas mendorong anggota keluarga mereka untuk sementara, dan menyeret aktivis keluar dari rumah mereka secara kasar. Sebagian agen dari kalangan militer

melakukan penyamaran dan melakukan pengawasan sepanjang malam, menangkap pemimpin, profesor, dan anggota organisasi yang dianggap pembangkang. Mereka yang berhasil menghindari polisi memutuskan untuk bersembunyi. Banyak aktivis di belahan lain negara itu ditangkap malam itu, namun bukan pemimpin dari mahasiswa Chonnam National University. Mereka terisolasi dan tidak dapat memobilisasi anggota yang lain untuk melakukan pemberontakan. Kegiatan di balik demonstrasi tersebut dibongkar sehingga menyebabkan gerakan tersebut lumpuh ditaklukan militer (Jae-eui, 2017, hlm. 40-41).

Sesaat sebelum kudeta, dalam sebuah wawancara tiga jam dengan Kepala Biro Tokyo Time, Edwin M. Reingold, dan koresponden S. Chang, Chun Doo Hwan berkata, "The geopolitical situation in Korea leaves us constantly confronted with the danger of invasion... We have to develop a political system compatible with our own conditions. It is imperative for us to build a democracy that will contribute to our own national development-whether it is Western-style or not. (Situasi geopolitik di Korea membuat kita terus-menerus dihadapkan pada bahaya invasi. Kita harus mengembangkan sistem politik yang sesuai dengan kondisi kita. Sangat penting bagi kita untuk membangun sebuah demokrasi yang akan berkontribusi pada pembangunan nasional kita sendiri - entah itu gaya Barat atau tidak)" Wawancara pertamanya dengan wartawan asing diterbitkan dalam terbitan Time, 26 Mei 1980 yang ditulis oleh Hadden dan Luce.

Presiden Choi Kyu Ha dan Chun Doo Hwan, mengeluarkan sebuah pernyataan pada pukul 4.30 malam tanggal 18 Mei.

Dia memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah Korea. Kelompok Militer Baru melarang kegiatan politik, memerintahkan penutupan universitas, melarang adanya demonstrasi, dan meningkatkan kontrol pemberitaan media melalui perintah darurat militer nomor 10, memperingatkan bahwa kerusuhan tersebut akan menggoyahkan negara jika hal tersebut terus terjadi. Jenderal John Wickham, Komandan A.S-R.O.K. Gabungan Angkatan Komando, tiba di Amerika Serikat pada tanggal 14 Mei untuk memberi kabar kepada pemerintah di Gedung Putih mengenai situasi di Seoul. Dia telah merencanakan untuk kembali ke Korea Selatan pada tanggal 27 Mei, namun ia kembali pada tanggal 17 Mei. Pada tanggal 18 Mei 1980 terjadi tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pihak militer di Universitas Nasional Cheonnam dan Universitas Chosun, orang pertama yang terbunuh adalah orang tuli, ia tidak dapat mendengar bahwa pasukan militer telah datang lengkap dengan persenjataan mereka, tapi dia tidak sendiri. Banyak mayat-mayat yang penuh luka dan ditumpuk di atas truk, di mana para pasukan militer terus memukul dan menendang mahasiswa dan orang-orang yang dianggap menentang pemerintah. Sebagai mahasiswa mereka berusaha untuk bersatu, namun para tentara terus menyerang mereka dengan menggunakan bayonet atau belati dan menangkap lebih banyak orang. Banyak diantara mereka ditelanjangi kemudian disiksa. Terdapat seorang anak kecil yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian bertanya kepada orang tuanya saat pasukan militer datang, beberapa diantara mereka telah diajarkan nilai-nilai politik di usia dini dan

berteriak bahwa komunis telah mengambil alih tentara (Katsiaticas, 2012, hlm. 166).

Kemudian di sore hari pada tanggal 18 Mei 1980, selebaran muncul di jalanan. Selebaran tersebut berisi mengenai kebrutalan yang telah dilakukan militer. Selebaran tersebut dibuat oleh anggota Voice of The University, sebuah koran bawah tanah yang dibentuk oleh Chonnam National University dan para aktifis teater 'Clown' sebuah institut kebudayaan modern. Selebaran tersebut sampai hingga ke tengah kota, sebagai salah satu bukti bahwa ada beberapa pemimpin mahasiswa yang tidak tertangkap anggota militer dan hadir untuk memimpin perjuangan demokrasi. Empat hari kemudian, para aktivis ini bergabung dengan berbagai kelompok. Pamflet kecil untuk menerbitkan buletin militan edisi pertama yang merupakan sebuah publikasi yang memainkan peran penting dalam propaganda gerakan tersebut (Jae-uei, 2017, hlm. 41-42).

Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 1980, pada pukul 11:00, warga berkumpul dan menyerbu jalan Gumnamro, Polisi dan Pasukan Darurat Militer mulai menembaki gas air mata di kerumunan, namun demonstran terlalu emosi untuk melarikan diri dan malah kembali dengan melemparkan batu ke petugas polisi dan tentara. Akhirnya, pasukan Brigade secara brutal menekan pemberontakan tersebut. Hal itu hanya semakin memicu kemarahan warga dan mendorong demonstrasi yang berkembang menjadi pemberontakan demokratis berskala besar (Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße, t.t, hlm.12).

Di dalam Undang-Undang Darurat Militer bahwa aktifitas media akan diawasi sepenuhnya oleh pemerintah, salah

satunya ada stasiun televisi *Munhwa Broadcasting Corporation* (MBC) yang dikontrol penuh oleh pemerintah. Semua berita mengenai pemberontakan Gwangju dimanipulasi dan diputarbalikan, seolah-olah demonstran yang melakukan tindak kekerasan kepada pihak militer, dan banyak anggota militer yang kehilangan nyawa dikarenakan oleh pemberontakan tersebut. Merasa geram dengan pemberitaan stasiun televisi tersebut, pada tanggal 20 Mei 1980, para mahasiswa mengepung stasiun televisi *Munhwa Broadcasting Corporation* (MBC). Pada hari itu juga para demonstran membakar stasiun lokal *Munhwa Broadcasting Corporation* (MBC) dan Stasiun *Korean Broadcasting System* (KBS) Gwangju karena mereka mengumumkan bahwa warga kota Gwangju adalah pemberontak (Fuchs & Tokushi, 2017, hlm. 309).

Sementara mahasiswa melakukan pemberontakan di stasiun televisi lokal, warga berkumpul lagi di Gumnamro. Mereka mengganti slogan perlawanan pada awalnya adalah "Withdraw the Martial Law (Tarik Hukum Darurat)" dengan "Damn the Slaughter Chun Doo Hwan (Pembantai Sialan Chun Doo Hwan)". Pasukan militer bersenjata dengan senapan mesin mulai tanpa pandang bulu menembaki warga di depan Balaikota, selain itu para tentara juga menutup semua akses jalan menuju Gwangju sehingga wilayah Gwangju menjadi terisolir hampir tidak ada bantuan maupun berita yang meliput kejadian Gwangju pada saat itu.

Pada tanggal 21 Mei 1980 tepatnya pukul 11:00 pemimpin darurat militer membuat sebuah pidato yang mengharuskan warga untuk tenang. Namun seolah tidak mengindahkan pidato tersebut, warga

masih berhadapan dengan para tentara dan bersiap untuk menghadapi serangan balasan. Pada pukul 12:50, beberapa bus yang merupakan bagian dari demonstrasi menerobos garis militan yang telah dibatasi oleh tentara, Pasukan paralyang tentara mulai menembak dengan senapan mesin dari helikopter dan mobil bersenjata. Warga sipil yang merupakan bagian daripada demonstran menyelamatkan yang lain, melarikan diri, dan beberapa diantaranya terbunuh di tangan militer. Sebanyak 300.000 demonstran kemudian menyerang kantor polisi dan markas tentara di dekat Balai Kota dan merampas senjata yang terdapat disana. Warga kemudian menggunakan senjata rampasan tersebut untuk menghadapi kembali pasukan tentara di Balaikota, sehingga ketegangan meningkat dari yang sebelumnya dan pasukan tentara memilih mundur sementara dari wilayah Gwangju.

Pada tanggal 22 Mei 1980, masyarakat kembali berkumpul di dua lokasi pertama berkumpul di jalan Geumnamro dan lokasi kedua di Balai Kota. Helikopter militer mulai mengepung Gwangju dari langit dan para pasukan militer menjatuhkan lembaran dari helikopter tersebut yang berisikan peringatan kepada para demonstran. Sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Korea Selatan, masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang National Korea Selatan di atas gedung Balai Kota lengkap dengan hiasan pita hitam di tiang bendera tersebut. Hingga pada akhirnya Perdana Menteri Park Choong-Hoon melaporkan bahwa wilayah Gwangju dalam keadaan benar-benar kacau.

Pemerintah Chun Doo-hwan mengeluarkan sebuah laporan yang

menyebutkan bahwa 144 warga sipil, 22 tentara, dan empat petugas polisi tewas dalam pemberontakan Gwangju. Siapa pun yang memperlakukan korban tewas bisa ditangkap. Namun, angka sensus menunjukkan bahwa hampir 2.000 warga Gwangju menghilang selama periode ini. Selama pemberontakan berlangsung seorang reporter asing dari Jerman bernama Jürgen Hinzpeter berhasil melewati garis penjurangan pasukan militer dan masuk ke wilayah Gwangju. Berkat kerja keras reporter tersebut, berita palsu yang menyebar luas di luar Gwangju, berhasil diluruskan oleh pemberitaan Jürgen Hinzpeter. Ia memperlihatkan kejadian yang sebenarnya di Gwangju, saat kabar pembantaian tersebut menyebar ke seluruh provinsi, demonstrasi anti-pemerintah meletus di kota-kota terdekat Gwangju termasuk Mokpo, Gangjin, Hwasun, dan Yeongam. Tentara juga menembaki pemrotes yang berada di wilayah Haenam (The May 18th History Compilation Committee of Kwangju City, 2000, hlm. 164).

Menurut penulis, masyarakat Korea Selatan khususnya Gwangju dipengaruhi oleh cita-cita Marxis. Dimana pada saat itu dibalik kejayaan perekonomian Korea Selatan terdapat sistem kapitalis yang dikuasai oleh para kelompok konglomerat (Chaebols), sehingga berimbas kepada makna pekerja yang menjadi sarana eksploitasi. Marx beranggapan bahwa ketika negara mulai dikuasai oleh kapitalisme, perlu adanya pembebasan kemanusiaan atau proletarian secara progresif untuk memasuki jalan menuju ekonominya sendiri tanpa ada pihak yang dirugikan. Tentunya dalam hal pembebasan tersebut akan terjadi benturan pada kepentingan politik ideologi, agama,

hingga memungkinkan adanya konflik antara penguasa dengan rakyat (Pelly dan Menanti dalam Bahari, 2010, hlm. 3-4). Berdasarkan pengaruh cita-cita Marxis yang sama, beberapa Tim Profesional dan masyarakat Gwangju membentuk suatu komite untuk memberikan perawatan medis bagi korban luka, pemakaman untuk korban tewas, dan kompensasi untuk keluarga korban. Beberapa mahasiswa mengatur untuk memasak makanan bersama yang nantinya akan dibagikan kepada demonstran yang lain dan juga masyarakat kota. Selama lima hari, orang-orang memerintah Gwangju secara mandiri.

Pada tanggal 23 Mei 1980, Duta Besar Amerika Serikat, William Gleysteen menyerukan tindakan anti huru-hara yang tegas dalam kunjungan ke Perdana Menteri R.O.K. Dia mencatat bahwa: "Kami melakukan semua yang kami bisa untuk berkontribusi pada pemulihan ketertiban, dengan mengutip pernyataan yang dikeluarkan di Washington dan diminta untuk 'memotong' pasukan militer Korea untuk digunakan di Gwangju. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Hodding Carter mengumumkan: Pemerintahan Carter telah memutuskan untuk mendukung pemulihan keamanan dan ketertiban di Korea Selatan, sementara menunda pemberian liberalisasi" (John F. Kennedy School of Government, 2006, hlm. 44). Situasi di wilayah Gwangju, dua hari setelah masyarakat menguasai wilayah Gwangju, meskipun suasana kemenangan telah berada di atas kota, masyarakat masih mewaspadaai adanya penyerangan senjata di daerah pinggiran kota. Warga Gwangju secara sukarela membersihkan jalanan dan di sekitar pasar daerah gwangju mereka memasak nasi setiap hari dan menyediakan

makanan kepada tentara masyarakat yang selalu berjaga setiap malam.

Pertokoan mulai buka di sekitar wilayah Gwangju pada hari itu. Sekitar jam 10.00 malam hampir 50.000 orang mengerumuni alun-alun di depan Aula Provinsi. Di Sangmu-gwan terdapat peti mati persegi dengan mayat ditempatkan berdampingan. Mayat yang masih berada di dalam peti ditutupi dengan kain katun. Tempat pembakar dupa diletakan di pintu masuk dan beberapa batang dupa dibakar oleh sebagian besar warga hingga membentuk antrian untuk melakukan doa. Sementara itu, beberapa panitia pelajar telah menyelenggarakan rapat pada malam sebelumnya, membahas ketertiban umum, publisitas, pemakaman, pengumpulan persenjataan, dan lain sebagainya. Disaat rapat, seringkali terjadi perpecahan diantara Komite Mahasiswa terkait persenjataan yang sebelumnya mereka sita. Pihak militer telah menuntut kembalinya senjata tersebut.

Pada tanggal 24 Mei 1980, enam hari setelah pemberontakan Gwangju dimulai. Perpecahan pendapat di dalam Komite Mahasiswa dan tentara warga pada akhirnya menyebabkan keretakan yang tidak dapat didamaikan. Pada akhirnya Komite Mahasiswa memutuskan untuk mengajukan permintaan sebagai berikut:

1. Pada saat itu insiden Gwangju disebut sebagai “huru-hara yang dilakukan oleh kaum pemberontak”, mahasiswa meminta pemerintah menjelaskan mengapa menyebut mereka sebagai pemberontak dan oleh karena itu para mahasiswa meminta pemerintah untuk meminta maaf karena telah mendefinisikan pemberontakan demokrasi Gwangju sebagai huru-hara

atau kekacauan karena hal tersebut merupakan kehendak semua warga Gwangju.

2. Masyarakat Gwangju menginginkan diselenggarakannya upacara pemakaman untuk masyarakat Gwangju yang gugur dalam pemberontakan demokratisasi Gwangju.
3. Bebaskan semua mahasiswa dan warga yang dipenjara dalam kaitannya dengan kejadian 18 Mei 1980.
4. Memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh peristiwa 18 Mei sampai batasan yang diminta oleh Warga Negara Korea Selatan.

Pada hari yang sama, para wartawan dari berbagai negara secara aktif mengumpulkan informasi mengenai wilayah Gwangju untuk diberitakan. Tidak hanya wartawan asing saja, adapula wartawan lokal yang datang untuk mencari informasi. Masyarakat Gwangju tidak terlalu peduli atau merasa terganggu dengan wartawan Korea karena mereka datang tidak melaporkan informasi sesungguhnya melainkan berita yang sudah dimanipulasi. Oleh karena itu masyarakat lebih bersikap kooperatif dengan para wartawan asing karena mereka akan melaporkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Dalam situasi beberapa wartawan yang dapat masuk ke wilayah Gwangju, muncul desas-desus bahwa ada seorang mata-mata telah menyelip hingga ke Aula Provinsi (*The May 18th History Compilation Committee of Kwangju City, 2000, hlm. 121-122*).

Pada tanggal 25 Mei 1980 tepatnya pada pukul 7.00 malam, sebuah pertemuan digelar di lantai tiga balai provinsi.

Mereka menyelesaikan rencana untuk memperebutkan kepemimpinan. Para aktivis membawa tiga puluh mahasiswa ke kantor di Balai Provinsi. Pada waktu yang sama stasiun televisi KBS dalam acara berita malam mengumumkan bahwa Balai Provinsi telah jatuh ke tangan garis keras atau para pemberontak. Ratusan mahasiswa berkumpul, setiap kartu identitas diperiksa, dan non-siswa dialihkan. Para aktivis dengan cepat menyanai para pengikut mereka. Mereka merasa lebih efektif menggunakan mahasiswa untuk mencegah kekosongan kepemimpinan dan menggagalkan agen polisi dan membangun kepercayaan publik. Dengan memasukkan siswa ke dalam milisi, kepemimpinan juga mendapat kontrol lebih besar dalam situasi politik yang terus berkembang. Itu penting untuk menjaga persatuan. Para siswa dibagi menjadi sepuluh anggota. Dipimpin oleh individu yang paling mengerti situasi politik. Setelah kelompok terbentuk, setiap orang menerima pendidikan militer instan. Hanya sepuluh siswa yang telah menyelesaikan wajib militer (Jae-eui, 2017, hlm. 120-121).

Para pekerja termasuk ke dalam Serikat Pekerja Independen, seperti yang ada di Honam Electricity atau anggota J.O.C. (*Jeunesse ouvrière chrétienne*, atau Pekerja Kristen Muda). Para wanita menyiapkan makanan untuk milisi di Aula Provinsi. Mereka juga menyelenggarakan demonstrasi, dan menyebut diri mereka sebagai Biro Wanita. Jam 10:00 malam, pada tanggal 25 Mei 1980, pimpinan baru pemberontakan dibentuk.

Mereka juga meninjau ulang rencana untuk memanfaatkan dinamit di gudang senjata sementara di Balai Provinsi. Selama

negosiasi, mereka akan menghentikan invasi militer dengan mengancam untuk menggunakan persediaan dinamit tersebut. Para pemimpin menginginkan kehidupan sehari-hari Gwangju kembali normal. Mereka memilih berkonsentrasi pada:

1. Memulihkan jadwal bus kota;
2. Mendapatkan pegawai negeri dan polisi kembali bekerja, meski polisi akan dilucuti senjata;
3. Membujuk pemilik toko membuka kembali usaha;
4. Mendata beberapa kerusakan yang dilakukan oleh militer;
5. Mendistribusikan cadangan beras kota;
6. Memulai kembali koran lokal;
7. Menjatah sisa bahan bakar;
8. Menghubungkan kembali saluran telepon jarak jauh;
9. Membentuk unit patroli seluler.

Pada tanggal 26 Mei 1980, beberapa kelompok diantara berbagai Fraksi Sipil menunda negosiasi untuk perdamaian. Chun telah melakukan pemadaman media dan mengepung kota, memutus saluran telepon dan mengelilingi Kwangju dengan pasukan militer. Intinya, pemberontakan Gwangju terjadi terpisah dari wilayah Korea lainnya. Chun terbilang berhasil dalam menyembunyikan pembantaian membuat pemberontakan menyebar ke daerah lain di negara Korea Selatan (Duncan, 2009, hlm. 26). Para pasukan tentara telah diperkuat dan siap untuk masuk kembali ke kota. Para pendukung demokrasi disiapkan untuk penyerangan terakhir.

Pukul 05:00, masyarakat mendapat kabar bahwa sebuah tank bergerak menuju ke arah kota Gwangju. Berita tersebut sampai di jantung kota melalui sebuah radio yang dikomando. Balai Provinsi terus siaga penuh, dan setiap anggota milisi dimobilisasi dan siap. Para anggota komite pergi dan berbaring di jalan. Mereka memanggil tank, "Jika Anda datang ke kota, Anda harus menunggangi kita dan membunuh kita terlebih dahulu!". Seorang komandan pemerintah mengancam, "Lepaskan unsur-unsur dan penghasut yang tidak murni dengan biaya apapun! Serahkan senjata Anda dan bubar! Jika tidak, militer tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi!" Pimpinan pemberontakan tersebut menganalisis gerakan pemerintah: tank-tank, dengan menempuh jalan ke jalan tol, telah mengamankan rute transportasi untuk melakukan invasi habis-habisan. Mereka juga memotong pasokan bahan bakar pemberontak dengan memblokir cadangan di Asia Motor. Saat berita tentang serangan menyebar, orang-orang berkumpul sekali lagi di Balai Provinsi. Pukul 10.00 pagi, puluhan ribu orang berkumpul. Warga yang marah mengutuk militer, dan sebuah pernyataan berjudul "Kepada Tentara Nasional" dibacakan dari podium. Seorang pemberontak yang mengenakan seragam tentara cadangan membuat pidato yang berapi-api: "Semua anggota tentara cadangan, bangkit!" dia mendesak. Setelah demonstrasi tersebut, ribuan siswa SMA memimpin sebuah demonstrasi di sekitar kota, meneriakkan, "Kami tidak akan pernah menyerah! Serahkan senjata kita? Tidak mungkin!".

Pada tengah malam pada tanggal 27 Mei 1980, Tentara Darurat Militer

meluncurkan rencana invasi Gwangju mereka. Barikade milisi sipil di pinggiran kota tidak mendapat kesempatan melawan tank-tank militer. Sekitar pukul empat pagi, tentara mengelilingi Gedung Pemerintah Provinsi dimana milisi sipil memiliki kantor pusatnya. Disertai dengan hujan peluru, Pasukan Khusus dikerahkan ke gedung tersebut, dipersenjatai dengan senapan api. Senapan tua yang dikumpulkan oleh milisi sipil tidak dapat melawan senjata mereka yang luar biasa. Pada hari itu, sejumlah besar milisi sipil jatuh. Tangan dan kaki korban selamat diikat dengan kabel, dan mereka diseret ke tempat yang tidak diketahui. Dalam waktu kurang dari 90 menit, pemberontakan Demokratik Gwangju sepuluh hari telah berakhir.

Kebudayaan yang tercipta dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi atau aktifitas sesama anggota masyarakatnya. sejarah muncul dan perkembangan Angklung Gubrag.

SIMPULAN

Dalam kehidupan politik masyarakat Korea Selatan yang tidak lepas dari Ideologi Konfusianisme. Konfusianisme sendiri apabila dikaitkan dengan politik akan menciptakan suatu pemerintahan yang bersifat otoriter, dimana segala keputusan atau keberlangsungan negara sepenuhnya berada di tangan presiden dan masyarakat tidak diperkenankan untuk ikut andil dalam menjalankan pemerintahan. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan oleh Korea Selatan. Beberapa elit politik menjadikan demokrasi hanya sebagai embel-embel biasa, sedangkan dalam pelaksanaannya

jauh dari kata demokrasi. Salah satunya dengan dilaksanakannya Konstitusi Yushin yang membatasi pergerakan masyarakat dalam pemerintahan, dan juga pemilihan presiden yang dipilih secara sepihak tanpa pemilihan oleh masyarakat.

Untuk mengembalikan demokrasi dalam pemerintahan Korea Selatan, beberapa mahasiswa dan masyarakat melakukan suatu gerakan untuk menyalurkan aspirasinya. Mengajak para elit politik untuk berdiskusi menuju pemerintahan yang lebih baik, namun hal tersebut dibalas brutal oleh pemerintah dibantu dengan kekuatan militer. Dilihat dari pergerakan demokratisasi Gwangju bahwa masyarakat Korea Selatan pada saat itu telah menyadari bahwa dalam menjalankan pemerintahan demokrasi yang baik perlu adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat tersebut untuk ikut ambil dalam permasalahan politik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyan, D.N. (2016). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Bahari, Y. (2010). *Karl Max: Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 1 (1), hlm. 1-10.

Cunningham, F. (2002). *Theories of Democracy: A Critical Introduction*. New York: Routledge.

Duncan, B. (2009). *Anti Americanism and National Identity In South Korea. East Asian Languages and Cultures*. University of Kansas.

Fuchs & Tokushi K. (2017). *A New Modern History of East Asia*. Vol.7, V&R Germany: Unipress.

Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Hadden, B & Luce, H. R. (1980, 26 Mei). *Chun: A Shadowy Strongman*. New York: Majalah Time, Vol. 115(21), hlm. 99.

Ismaun. (2005). *Sejarah Sebagai Ilmu*. Bandung: Historia Utama Press.

Jae-eui, L. (2017). *Gwangju Diary: Beyond Death, Beyond the Darkness of the Age*, May 18 Memorial Foundation: Gwangju.

John F. Kennedy School of Government. (2006). *Korea Policy Review*, Volume 2. Cambridge: John F. Kennedy School of Government.

Katsiaficas, G. (2012). *Asia's Unknown Uprisings Volume: South Korean Social Movements in the 20th Century*. California: PM Press.

Katsiaficas. G. (2013). *South Korean Democracy: Legacy of the Gwangju Uprising*. Routledge.

Matsui, Y. (2002). *Perempuan Asia dari Penderitaan Jadi Kekuatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mikyoung, K. (2003). *South Korean Women Workers Labor Resistance in The Era of Export-Oriented Industrialization 1970-1980*. Development and Society, 32 (1), hlm. 77-101.

Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths of the Republic of Korea. (2004). *A Hard Journey to Justice: First Term Report by the Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths of the Republic of Korea*. Seoul

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

- Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße.
(t.t). *Der Aufstand von GWANGJU 1980 Eine Fotoausstellung zur Demokratiebewegung in Südkorea*,
Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße:
Postdam
- The May 18th History Compilation
Comittee of Kwangju City. (2000). *The
May 18 Kwangju Democratic Uprising,
The May 18th History Compilation
Comittee of Kwangju City*: Gwangju.
- Yoon, Yang. S & Mas'oeed, M. (2003).
*Masyarakat Politik dan Pemerintahan
Korea: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:
UGM Press.